BAB 6

SARAN

Berdasarkan hasil Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang telah dilaksanakan di Apotek Libra selama lima minggu, yang berlangsung mulai tanggal 16 Januari – 17 Februari 2017, ada beberapa saran atau masukan bagi calon apoteker, sebagai berikut:

- a. Mahasiswa calon apoteker perlu meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi sehingga dapat memberikan informasi yang baik dan tepat kepada pasien, serta membekali diri dengan pengetahuan yang cukup tentang obat-obatan yang sering digunakan oleh masyarakat agar dapat memberikan pelayanan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat dengan benar dan jelas.
- b. Mahasiswa calon apoteker sebaiknya membekali diri dengan dasar pelayanan kefarmasian, undang-undang kefarmasian dan manajemen apotek. Dengan demikian diharapkan calon apoteker lebih siap dalam melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker di apotek, sehingga waktu PKP selama lima minggu benar-benar dapat dimanfaatkan dengan efektif dan efisien.
- c. Mahasiswa calon apoteker harus berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan PKP di apotek agar dapat memperoleh informasi yang optimal sehingga dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan keterampilan dalam mengelola apotek.
- d. Mahasiswa calon apoteker juga diharapkan dapat mempelajari macam - macam obat dari berbagai kelas terapi agar wawasan dan pengetahuan yang didapatkan lebih banyak.
- e. Penyediaan tempat khusus untuk konseling sangat memberikan keuntungan bagi pasien karena pasien dapat mengungkapkan tentang

keluhan-keluhan yang dirasakannya dan peran apoteker dapat berfungsi secara optimal serta dapat menerapkan *Patient Medication Record* (PMR) sebagai salah satu wujud pelayanan kefarmasian kepada pasien serta untuk menjalankan peran apoteker dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan POM RI (2013). Peraturan Kepala Badan POM RI No. 40 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Prekursor Farmasi dan Obat Mengandung Prekursor Farmasi. Jakarta.
- British National Formulary 57th ed, 2009. BMJ Group and RPS Publishing, London.
- Hartini, Y.S. & Sulasmono, 2007. Apotek: Ulasan Beserta Naskah Peraturan Perundang-Undangan Terkait Apotek Termasuk Naskah dan Ulasan Permenkes tentang Apotek Rakyat. Edisi Revisi. Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang Standar pelayanan Kefarmasian di Apotek. Kepmenkes Nomor 1027 tahun 2004.
- Lacy, F. C., Armstrong, L. L., Goldman, P. M. and Lance, L. L., 2009, *Drug Information Handbook*, ed. 17th, American Pharmacists Association, North American.
- McEvoy, G. K., 2011, *AHFS Drug Information Essential*, American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Bethesda, Maryland.
- Menkes RI, 2002, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

- Menkes RI, 2004, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1027/Menkes/SK/IX/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menkes RI, 2009, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menkes RI, 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 35 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Jakarta.
- Menkes RI. (2014). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
- Menkes RI. (2016). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
- Menkes RI, 2015, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, Menteri Kesehatan, Jakarta.
- MIMS. 2017. MIMS Indonesia. <https://www.mims.com/> [online]. Diakses pada Februari 2017.
- Neal, M.J. 2006. At a Glance Farmakologi Medis Edisi Kelima. Jakarta : Penerbit Erlangga.

Peraturan Menteri Kesehatan RI tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian izin Apotek, Permenkes Nomor 922 / MENKES / PER / X / 1993.

Presiden RI, 2009, Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Presiden Republik Indonesia, Jakarta.

Presiden RI, 2009, Undang-Undang No. 35 tentang Narkotika, Presiden Republik Indonesia, Jakarta.

Seto, S., Nita, Y. dan Triana, L., 2008. Manajemen Farmasi : Lingkup Apotek, Farmasi Rumah Sakit, Pedagang Besar Farmasi, Industri Farmasi, ed. 2, Penerbit Universitas Airlangga, Surabaya.

Sweetman, S. C., 2009, Martindale The Complete Drug Reference, ed. 36th, The Pharmaceutical Press, London.

Tatro, D. S., 2003, A to Z Drug Facts, Facts and Comparisons.

Umar, M., 2005. Manajemen Apotek Praktis. CV. Al-Rahman, Solo.